

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Zainuddin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Basah, Sjachran. 1983. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Fahmal, Muin. 2006. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam mewujudkan Pemerintahan Yang bersih*. UII Press. Yogyakarta
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemrintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesai Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Setara Press. Malang.
- Manan, Bagir. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Muhyanto. 1991. *Masalah dan Tantangan Pembangunan Pedesaan Jangka Panjang Tahap Ke-II*, APMD, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1981. *Dimensi-Dimensi pemerintahan Desa*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Saparin, saparin. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta Timur.
- Sumardjono, Maria S.W. 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Gramedia. Jakarta.
- Syafrudin, Ateng. Suprin Na'a. 2010. *Republi Desa*. Alumni. Bandung.
- Widjaja, H.A.W. 2002. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, A.W. 1993. *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

### Tesis dan Skripsi:

- Alfaqih, Somadi. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Dani , Digantara. "Hubungan dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa”. *skripsi* Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2000.

Dhermawan, Dhandy. “Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, di Kabupaten Bantul”. *Tesis* Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4587

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 55 Tahun 1976 tentang bantuan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1100.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 89.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April Nomor Desa 5/1/29

Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 No. 63.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 No. 33.

### **Jurnal**

Emilda Firdaus, “Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 2, No.2, 2011.

**Internet:**

“Penyelenggaraan Administrasi Desa Tugas/Fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD”, <http://upkwolowae.blogspot.com/2012/04/tugasfungsi-kepala-desa-perangkat-desa.html> (diakses pada tanggal 20 september 2018).

“Polisi Turun Tangan dalam keterangan pelaksanaan Tugas Camat” <http://radior2b.com/2017/12/11/polisi-turun-tangan-keterangan-pelaksana-tugas-camat-dikorek/> (Diakses Pada Tanggal 17 September 2018)